

PENGARUH KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI RIAU

Oleh :

Novita Dewi

Pembimbing : Yusbar Yusuf dan Rita Yani Iyan

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : dewinovita392@gmail.com

*Effect Of Poverty And Economic Growth Of The Human Development Index In
Riau Province*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of economic growth on poverty and human development index in Riau Province. The data used is secondary data with cross section including data one year in every district in the province of Riau on each variable used. This secondary data sourced from the Central Statistics Agency Pekanbaru. Methods of data analysis used in this research is quantitative method with data analysis and linear regression analysis using SPSS. In this model the independent variable used is the Poverty and Economic Growth. While the dependent variable is the Human Development Index. The result showed that first, Poverty and significant effect on the human development index in the province of Riau. From equation known poverty variables showed a coefficient of -0.079 means that if there is an increase poverty by 1% will decrease the HDI of 0.079% means that every increase in poverty would decrease the percentage of HDI in Riau Province. For poverty variables obtained t is greater than t table so H_0 rejected H_a accepted. Second, Economic growth showed a coefficient of 0.024 means that if there is a change of economic growth of 1% there will be changes to the HDI of 0.024% means that any changes in the economic growth will affect the percentage of HDI in Riau Province.

Keyword : Poverty, Economic Growth, and Human Development Index.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual. Pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial,

sikap-sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Sebagai suatu proses, pembangunan tentu saja dilakukan dengan melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada sekaligus merespon perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan tuntutan-tuntutan

pergeseran waktu akibat berkembangnya peradaban, sistem sosial kemasyarakatan, dan teknologi yang lebih maju.

Pada awalnya, pembangunan merupakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah dan negara, masyarakat dianggap pasif menjadi objek pembangunan. Belakangan ini, perspektif baru tentang pembangunan berkembang, tidak lagi hanya memberikan beban kepada unsur pemerintah, melainkan mulai mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak ketiga seperti dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di setiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolok ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan, namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang

berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Adapun kualitas manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia. (Mulyadi, 2003) menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan, yaitu pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang, pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, untuk penduduk miskin peningkatan kualitasnya dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif serta mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepaskan diri dari kemiskinan menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan KB, meningkatkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran penduduk.

Menurut (Ginting, 2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.

Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari angka IPM. (Arif, 2012) dalam penelitiannya menyatakan IPM merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas).

IPM disusun dari komponen pembangunan manusia yang dianggap menjadi dasar yaitu ketahanan hidup/usia, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pendidikan yang dihitung berdasarkan tingkat rata-rata melek huruf dikalangan penduduk dewasa dan angka rata-rata lama sekolah, kualitas standar hidup yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli dari mata uang domestik di masing - masing negara (BPS, 2012).

Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembangunan. *United Nations Development Program* (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu IPM untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan, dan indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat.

Provinsi Riau memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya. Dengan demikian memiliki potensi sumber daya manusia yang siap untuk diberdayakan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk melaksanakan pembangunan daerah secara lebih mandiri. Berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Provinsi Riau selama periode 2005 - 2025 yaitu "Mewujudkan Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin, di Asia Tenggara Tahun 2020 dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan Provinsi Riau".

Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Riau dari tahun ke tahun berfluktuatif sehingga diperlukan beberapa program guna meminimalisasi tingkat fluktuasinya, dengan demikian pembangunan manusia dapat lebih stabil. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik.

Peran pemerintah dalam meningkatkan IPM juga dapat berpengaruh melalui realisasi belanja

negara dalam pelayanan publik. Peran pemerintah dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia.

Melihat fenomena diatas, pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian ini, maka permasalahan yang akan di lihat dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau ?

Dan adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau.

TELAAH PUSTAKA

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dan bukan

sebagai alat pembangunan. Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (BPS, 2012).

Pembangunan manusia adalah sebuah proses perluasan pilihan bagi manusia, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat dipersentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan dipersentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, sementara dimensi kehidupan yang layak dipersentasikan oleh indikator kemampuan daya beli (BPS, 2012).

B. Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS, 2012) lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*proverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Menurut (Yacoub, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara.

Menurut (*World Bank*, 2004) salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Menurut (Adisasmita, 2005) indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan.

Tolok ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan

adil dimuka hukum dan sebagainya (Adisasmita, 2005).

C. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk (Jhingan, 2007). Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara adalah penambahan produksi barang dan jasa, dan perkembangan infrastruktur. Semua hal tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara dalam periode tertentu.

Menurut (Todaro dan Smith, 2006) ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

- a) Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang ditabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dimasa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar

lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan kerja perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga-tenaga terdidik dan sumber daya manusia yang terampil.

- b) Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.
- c) Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni :
 - 1) Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
 - 2) Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.

D. Pengaruh Kemiskinan terhadap IPM

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam

meningkatkan IPM dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan memberikan gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin dan Bonar, 2004).

Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, penduduk hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum atau dapat dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan internasional (Todaro dan Smith, 2006).

Tingkat kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi

kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang.

Terdapat hubungan penting antara IPM dan kapasitas pendapatan produktif. Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian, akibat rendahnya IPM adalah orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam penanganan kemiskinan (Kanbur dan Squire, 1999).

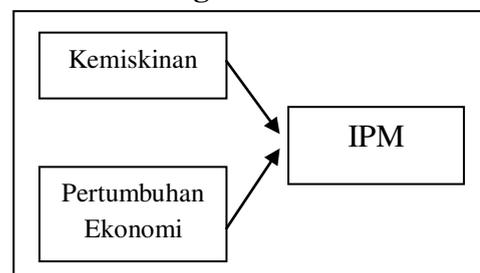
E. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tingkat pendapatan dan IPM mempunyai korelasi yang luas. Namun pertumbuhan pendapatan tidak secara otomatis meningkatkan IPM. Demikian pula, perbaikan kesehatan dan pendidikan yang menyebabkan peningkatan IPM tidak

selalu mengarah pada peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan proses yang terjadi di masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi kaum miskin. Misalnya, berbagai peningkatan hasil panen hanya menguntungkan pemilik tanah dan bukan tenaga kerja. Akan tetapi, kondisinya bisa berubah. Masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat ganda dari pertumbuhan pendapatan serta peningkatan IPM jika pemerintah mau menggunakan manfaat dari pertumbuhan untuk membiayai pelayanan kesehatan dan akses pendidikan masyarakat miskin tersebut. Selain itu, struktur dan proses yang ada di masyarakat sudah tepat, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi juga dinikmati kaum miskin. Menurut World Development Report, kemajuan pada kedua bidang saling memperkuat satu sama lain dan yang satu tanpa yang lain tidak cukup (Kanbur dan Squire, 1999).

Kerangka Penelitian

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olahan, 2016

Hipotesis

Diduga kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

METODE PENELITIAN

Lokasi tempat penelitian ini adalah Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru dan penelitian ini dilaksanakan mulai dari Januari 2016 dengan menggunakan data tahun 2014. Tujuan menggunakan data tersebut adalah agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan akurat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *cross section*, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu (Kuncoro, 2013). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang dipilih adalah data kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau pada tahun 2014. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi-instansi terkait lainnya pada tahun 2014.

Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Riau. Untuk menganalisa pengaruh terhadap analisa data ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda dengan menggunakan fasilitas program SPSS versi 20.0 (*Statistic Package for Social Sciences*). Dalam model atau persamaan tersebut pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM dapat digambarkan dalam suatu bentuk fungsi sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2)$$

Dimana :

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)

X₁ = Kemiskinan (%)

X₂ = Pertumbuhan Ekonomi (%)

Selanjutnya model diatas akan dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear berganda (Hasan, 2015) :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + u$$

Dimana :

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)

X₁ = Kemiskinan (%)

X₂ = Pertumbuhan Ekonomi (%)

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

u = Variabel Pengganggu (residual)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data berguna untuk melihat pengaruh antara variabel kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel IPM. Hasil analisis menggunakan regresi linear berganda diperoleh dengan menggunakan program SPSS 20.0. Dari hasil pengujian tahap pertama diperoleh hasil model yang memenuhi ketentuan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Adapun hasil analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik yang diperoleh dari pengujian menggunakan program SPSS 20.0 sebagai berikut :

Hasil Pengujian terhadap IPM di Provinsi Riau

Berdasarkan analisis regresi linear berganda yang telah diuji

menggunakan SPSS 20.0 maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{LOG10Y} = 1,925 - 0,079 \text{ LOG10X1} - 0,024 \text{ LOG10X2} + e$$

Uji Simultan (Uji F)

Dari hasil pengolahan data dengan melakukan uji simultan atau (uji F) maka secara simultan variabel kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel IPM. Untuk menentukan nilai F tabel, maka digunakan tingkat signifikan 5%.

Hasil perhitungan Uji F yang diperoleh bahwa kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama mampu menjelaskan IPM di Provinsi Riau. Hal ini dijelaskan dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dimana nilai F_{hitung} 4,965 > F_{tabel} 4,26. Dimana nilai signifikan F yaitu 0,045 lebih kecil dari 0,05 sehingga kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan atau serempak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Riau.

Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Korelasi (R) dari tabel diatas maka diperoleh korelasi berganda sebesar $R=0,766$ atau sebesar 76,6% maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan keeratan korelasi yang kuat antara variabel kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Provinsi Riau.

Koefisien Determinasi (R²) dari tabel di atas memperoleh hasil perhitungan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,587 atau 58,7% artinya 58,7% IPM di Provinsi Riau dipengaruhi oleh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan

41,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Parsial (Uji t)

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan uji parsial (uji t) maka untuk menentukan nilai t statistik tabel digunakan tingkat signifikan 5%.

Berdasarkan dari analisis regresi diperoleh data mengenai perhitungan masing-masing variabel kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel IPM di Provinsi Riau, dimana :

- a) Dari hasil pengolahan data menunjukkan t hitung variabel kemiskinan adalah 3,229 dan t tabel 2,201 sehingga diperoleh kesimpulan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hal ini juga dijelaskan oleh nilai signifikan uji t yang diperoleh yaitu signifikan 0,016 dengan standar signifikan 0,05 maka nilai signifikan kemiskinan lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Riau.
- b) Dari hasil pengolahan data menunjukkan t hitung variabel pertumbuhan ekonomi adalah 0,437 dan t tabel 2,201 sehingga diperoleh kesimpulan $t_{hitung} < t_{tabel}$. Hal ini juga dijelaskan oleh signifikan uji t yang diperoleh yaitu signifikan 0,675 dengan standar signifikan 0,05 maka nilai signifikan pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat IPM di Provinsi Riau. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh

signifikan terhadap perubahan tingkat IPM di Provinsi Riau.

Pembahasan

Pengaruh Kemiskinan terhadap IPM

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa Kemiskinan berpengaruh dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Dari persamaan diketahui variabel kemiskinan menunjukkan koefisien sebesar -0,079 artinya jika terjadi kenaikan kemiskinan sebesar 1% maka akan menurunkan IPM sebesar 0,079% artinya setiap peningkatan Kemiskinan akan menurunkan persentase IPM di Provinsi Riau. Untuk variabel kemiskinan diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel sehingga H_0 ditolak H_a diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kemiskinan absolut dimana sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, penduduk hidup dibawah pendapatan riil minimum atau dapat dikatakan hidup dibawah kemiskinan Internasional. (Todaro dan Smith, 2006).

Jika garis kemiskinan semakin meningkat dan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka maka akan terciptanya lingkaran setan dimana akan terlihat dari rendahnya pendapatan nyata sehingga akan mengakibatkan permintaan menjadi rendah sehingga investasi juga rendah dan dapat mengurangi produktivitas. Selain itu, lingkaran setan juga menyangkut keterbelakangan manusia dan sumberdaya alam, dimana perkembangan sumberdaya alam itu tergantung pada kemampuan produktivitas manusianya. Jika

tingkat kemiskinannya tinggi maka manusia tidak akan mampu untuk memperoleh pendidikan sehingga terciptalah penduduk yang terbelakang dan buta huruf sehingga kemampuan untuk mengolah sumberdaya alam yang produktif tidak terpenuhi bahkan terbengkalai atau salah guna (Todaro dan Smith, 2006).

Berpengaruhnya tingkat kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Riau ini sesuai dengan teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan memberikan gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chalid dan Yusuf, 2014) dimana diperoleh hasil penelitian tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM

Pada penelitian ini diperoleh hasil menggunakan analisis regresi berganda menggunakan program SPSS 20.0. Dari hasil penelitian ini diperoleh persamaan variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan koefisien sebesar 0,024 artinya jika terjadi perubahan pertumbuhan

ekonomi sebesar 1% maka akan terjadi perubahan terhadap IPM sebesar 0,024% artinya setiap perubahan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi persentase IPM di Provinsi Riau. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh t hitung lebih kecil dari t tabel sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Dimana pada penelitian ini tidak ditemukan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Provinsi Riau sehingga hasil penelitian tidak dapat diinterpretasikan.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan (Chalid dan Yusuf, 2014).

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat sehingga IPM di suatu daerah justru juga mengalami peningkatan. Dimana semakin tinggi pendapatan nasional atau daerah maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru. Pendapatan yang tinggi tercermin dari tingginya pendapatan perkapita dan tumbuh secara positif dan berarti. Maka secara relatif semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka semakin besarlah harapan untuk

tidak mengganggu sehingga akan mendorong pemerataan pendapatan perkapita sehingga mendorong meningkatnya indeks pembangunan manusia (Putong, 2009).

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) secara langsung sehingga pada penelitian ini tidak ditemukan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Selain itu tidak ditemukannya pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Provinsi Riau menurut kabupaten/kota pada tahun 2014 juga disebabkan keterbatasan cakupan penelitian yang melihat hanya dalam satu tahun berdasarkan kabupaten/kota sehingga hasil penelitian tidak terlihat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Mirza, 2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,153434 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Sedangkan dalam penelitian ini tidak ditemukan pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap IPM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia, maka dapat disimpulkan:

- a) Kemiskinan berpengaruh dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Dari persamaan

diketahui variabel kemiskinan menunjukkan koefisien sebesar -0,079 artinya jika terjadi kenaikan kemiskinan sebesar 1% maka akan menurunkan IPM sebesar 0,079% artinya setiap peningkatan Kemiskinan akan menurunkan persentase IPM di Provinsi Riau. Untuk variabel kemiskinan diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel sehingga H_0 ditolak H_a diterima.

- b) Pertumbuhan ekonomi menunjukkan koefisien sebesar 0,024 artinya jika terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan terjadi perubahan terhadap IPM sebesar 0,024% artinya setiap perubahan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi persentase IPM di Provinsi Riau. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh t hitung lebih kecil dari t tabel sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Dimana pada penelitian ini tidak ditemukan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Provinsi Riau sehingga hasil penelitian tidak dapat diinterpretasikan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk pemerintah diharapkan agar lebih mewujudkan jalur strategi pembangunan terutama pro-masyarakat miskin agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan melakukan pemberdayaan masyarakat dan pro-lapangan

kerja agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan investasi pada pekerja.

- b) Untuk meningkatkan pembangunan manusia di Provinsi Riau, pemerintah harus memfasilitasi infrastruktur pendidikan, kesehatan dan bidang ekonomi, sehingga dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau dalam rangka peningkatan kualitas SDM untuk memacu pertumbuhan ekonominya dengan memprioritaskan pelayanan prima dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi.
- c) Untuk peneliti selanjutnya, dapat memasukkan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, misalnya seperti : pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pendapatan domestik bruto (PDB), kebijakan fiskal dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arif, Hubban. 2012. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat*. Padang: Universitas Bung Hatta.

- Badan Pusat Statistik. Pekanbaru 2012. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau*. BPS Pekanbaru.
- Chalid, Nursiah dan Yusbar Yusuf. 2014. Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau: Pekanbaru.
- Ginting, Charisma K.S. 2008. Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia. *Tesis*. Sekolah Pasca Sarjana Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Jhingan, ML. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kanbur, Ravi dan Lyn Squire. 1999. The Evolution of Thinking about Poverty: Exploring The Interactions. <http://kanbur.dyson.cornell.edu/papers.htm>. Diakses tanggal 12 Juni 2016.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Mulyadi S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Ed. 1.Cet 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Putong, Iskandar. 2009. *Pengantar Mikro dan Makro Edisi 4*. Jakarta: Mitra Wacana M.
- Sitepu, Rasidin K. dan Bonar M. Sinaga, 2004. Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Model Komputable General Equilibrium. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Smeru. 2001. Definisi Kemiskinan. <http://www.smeru.or.id> (online). Diakses tanggal 12 Juni 2016.
- Todaro, M. P & Smith, S. SC. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Sembilan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- World Bank. 2004. Definisi Kemiskinan. <http://www.worldbank.org> (online). Diakses tanggal 12 Juni 2016.
- Yacoub, Yarlina. 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Sosial*. Pontianak Universitas Tanjungpura. Pontianak.